
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 772 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- KESATU : Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah sebagaimana adanya uji konsekuensi terhadap permohonan informasi publik yang tidak tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

a.n SEKRETARIS JENDERAL
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,



Arnes Lukman

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 772 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi yang memuat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor telepon, tanda tangan, riwayat dan tingkat pendidikan, rekam medis, nomor rekening, nomor NPWP, NIK, data kapabilitas dan intelektual, kondisi keuangan yang dikuasai Kementerian Perindustrian	UU NO. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h, UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Permanen
2	Data disposisi surat masuk dan keluar yang sifatnya rahasia, terbatas, dan sangat rahasia	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Memorandum atau surat internal yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Memorandum atau surat internal yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia, terbatas, dan sangat rahasia	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i	Jika ada pemeriksaan dari instansi Berwenang	Merugikan penyusunan kebijakan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
4	Rincian laporan (Anggaran; Keuangan, BMN; Program kegiatan; Perjanjian; Realisasi; Perencanaan kas harian; mingguan; dan bulanan) yang belum di audit	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
5	Rincian Anggaran Biaya	1. UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor/lembaga keuangan	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Sampai dengan dokumen final	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
7	Rencana penarikan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
8	Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
9	Rekening koran bendaharawan	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Lampiran surat BPK yang berisi daftar pemeriksaan dokumen kegiatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
11	Laporan Hasil Audit (Internal dan Khusus)	UU No 14 tahun 2008; Pasal 17 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i	Memorandum dan surat antar badan publik yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi Informasi	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
12	Kertas kerja audit BPK maupun Inspektorat Jendral	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor / lembaga keuangan	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
13	Rincian nilai LKE penilaian Zona Integritas (ZI), SAKIP maupun RB	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
14	Pilot Project/ Rancangan Roadmap dalam Proses Kerjasama dengan Instansi lain atau masih dalam pembahasan	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
15	Draf/proses/data penyelesaian kasus/perkara permasalahan hukum yang terkait dengan industri dan/atau Kementerian perindustrian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi atau mengganggu proses penyelesaian permasalahan hukum	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
16	Draft Rancangan Peraturan perundang-undangan yang sedang disusun	UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf i	Hingga diterbitkan menjadi Permen/Kepmen/Persekjen	Data dan informasi masih dalam bentuk konsep yang sewaktu-waktu bisa diubah	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
17	Dokumen Penanganan Perkara Hukum	UU No 14 tahun 2008; Pasal 17 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Dapat diberikan atas persetujuan Menteri/Putusan komisi Informasi/Pengadilan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
18	Alat / Dokumen Bukti Kasus Pelanggaran Hukum	UU No 14 tahun 2008; Pasal 17 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Dapat diberikan atas persetujuan Menteri/Putusan komisi Informasi/Pengadilan	Mencegah penyalahgunaan data atau alat bukti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
19	Draf/Proses/Data Penanganan Kasus Industri, baik berupa kasus anti-dumping, subsidi dan safeguard	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Data dan informasi, sewaktu-waktu dapat berubah sehingga perlu dirahasiakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
20	Berita acara pemeriksaan aparat hukum	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
21	Undangan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (Nomor surat, Nomor Kejadian Perkara, Nama Aparat Penegak Hukum, Nomor Telepon Aparat Penegak Hukum, NIP, Tanda Tangan)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
22	Dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
23	MoU/SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama) yang masih dalam proses kerjasama	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Munculnya persaingan tidak sehat	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
24	Dokumen Perundingan Perjanjian Luar Negeri : Request/offer list; Masukan Posisi Runding; Laporan Hasil Putaran Perundingan; Summary of Discussions (SoD); Agrees Minutes	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f)	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam segi posisi, daya tawar, dan strategi dalam proses negosiasi (perundingan) perjanjian	Mencegah diketahuinya posisi/daya tawar Indonesia oleh negara lain dalam perundingan sehingga kepentingan nasional dapat tercapai	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
25	Draft Dokumen MoU Kerjasama Industri dalam dan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Hingga diterbitkan MoU	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
26	Rancangan dokumen perjanjian FTA/PTA/EPA dan kesepakatan internasional lainnya berupa draf MoU; Draft text agreement; Leader's Declaration; Chair Summary	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (f) dan (i)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari polemik di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
27	DP3 dan SKP PNS	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, UU PDP Pasal 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
28	Hasil penilaian kinerja/kepuasan pegawai	1. Pasal 17 huruf a dan huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
29	Dokumen pemberhentian pegawai kontrak/honorer dari jabatan struktural	UU No 14 th 2008 huruf H angka 4	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
30	Lampiran hasil pemeriksaan pegawai pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
31	Dokumen Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu privasi pegawai	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
32	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan berubah	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
33	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
34	Source code programing pada website/aplikasi	1. UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf s 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya berupa program komputer	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
35	Sistem Database	1. UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf s 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya berupa program komputer	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
36	User dan Password Aplikasi	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 30 ayat 1,2,3)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
37	Kode akses Webserver	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
38	Kode akses control panel website	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 3	penyalahgunaan pihak lain	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
39	Topologi dan konfigurasi jaringan perkantoran dan data center termasuk di dalamnya alokasi alamat IP, sistem keamanan elektronik, source code dan konfigurasi aplikasi	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 2	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan penyalahgunaan hak akses.	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
40	Pengelolaan sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Topologi jaringan, Layout Infrastruktur, Code Aplikasi	UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 1	1. Dapat mengganggu operasional dan konektivitas. 2. Dapat mengganggu sistem	dapat melindungi operasional, konektivitas TIK	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
41	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	1. UU. No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 1 2. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun. 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; pasal 66 3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025	1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	1. Melindungi proses penegakan hukum; 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Tahun berjalan (hingga berakhirnya kegiatan lelang)

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Dapat mengungkap rahasia pribadi; 9. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	3. Melindungi pertahanan dan keamanan negara; 4. Melindungi kekayaan alam Indonesia; 5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional; 6. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri; 7. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Melindungi rahasia pribadi; dan 9. Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	
42	Bukti Potong Pajak	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan	Dapat mengganggu kepentingan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
43	Dokumen khusus sengketa pengadaan barang/jasa	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan rahasia pribadi/badan hukum	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkap rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
44	Kode (Barcode, QRCode) pada dokumen jaminan bank	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
45	Seluruh Nama (Nama PPK, Nama Direktur, Nama Ketua dan Anggota Pokja, Nama Pemegang Saham) pada dokumen pengadaan barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
46	Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
47	Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
48	Dokumen Penyedia	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU PDP	data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
49	Dokumen Bill of Quantity	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
50	Dokumen Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b 2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
51	Dokumen Copy Jaminan Pelaksana	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
52	Dokumen Copy Jaminan Uang Muka	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
53	Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
54	Dokumen Final Hand Over (FHO)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
55	Informasi tentang profil calon investor yang mengusulkan dan memanfaatkan fasilitas tax holiday, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP)	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Dapat mengungkapkan rahasia perusahaan	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
56	Dokumen Legalitas Perusahaan (NIB, Perizinan Berusaha, Akta, NPWP, Sertipikat Tanah, NIK) yang dikuasai Kementerian Perindustrian	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 poin b	Penyalahgunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
57	Dokumen hasil verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 ayat b	Penyalahgunaan Informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Mengacu pada UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik bahwa informasi dimaksud dapat mengungkapkan rahasia pribadi/badan publik dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
58	Dokumen berupa sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Tanah, Letter C, SHGB, SHP, SHGU, SHPN,	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
59	Data terkait Perusahaan di bawah Kementerian Perindustrian	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 3. UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
60	Daftar dan rincian data pelanggan dari perusahaan/individu serta data hasil uji/kalibrasi yang ada dalam aplikasi SIPPT	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 (b)	Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan pribadi pelanggan dan sebagai perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data pribadi pelanggan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
61	Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
62	Dokumen hasil audit, pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, sampling, uji profisiensi, validasi dan verifikasi pada unit BSKJI	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
63	Hasil assesment perusahaan peserta INDI 4.0 dan National Lighthouse	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap hasil evaluasi kapabilitas dan kemampuan perusahaan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
64	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
65	Proses penilaian penerimaan calon peserta didik	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi pegawai	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
66	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf h	Penyalahgunaan informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
67	Video materi pelatihan	1. UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf p 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
68	Laporan Aktualisasi Peserta Diklatsar	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
69	Naskah Soal Ujian Sekolah dan PPDB	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi dan privasi peserta didik	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
70	Berita Acara Serah Terima Peserta Diklat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
71	Dokumen Sertifikat Kompetensi Peserta Diklat	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Penyalahgunaan pihak lain	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
72	Laporan Evaluasi Diri Akreditasi	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Penyalahgunaan pihak lain	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
73	Laporan Kinerja Perguruan Tinggi	1. UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf g 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atas karya seni terapan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
74	Proses hingga hasil karya desain batik	Pasal 17 huruf (b) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 44 huruf (b) UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
75	Aset animasi/hasil karya tenant Inkubasi Bisnis BDI Denpasar/mitra industri	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mendapat perlindungan karena informasi tersebut berifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
76	Formula / Hasil penelitian yang didaftarkan untuk rahasia dagang	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, UU No.14 Tahun 2001 tentang paten pasal 3 ayat 1, UU desain industri No.31 Tahun 2000	Apabila informasi disampaikan kepada masyarakat sebelum diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten (filing date) maka pengajuan paten atau desain industri dapat ditolak karena tidak baru.	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
77	Hasil Research and Development di bidang IPTEK yang belum mendapatkan HAKI	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
78	Dokumen Pengajuan Hak Cipta dan Paten	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
79	Dokumen penelitian SPK dan hasil litbangyasa dengan Industri	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
80	Draft Jurnal Penelitian	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Dapat melindungi persaingan industri	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
81	Laporan Hasil Verifikasi Sertifikat TKDN dan BMP	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan informasi data perusahaan dan persaingan industri yang tidak sehat	Dapat melindungi persaingan industri	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
82	Data Perusahaan yang disubmit dalam Aplikasi SIMIRAH	UU No.14 Tahun 2008	Penyalahgunaan Informasi data	Mencegah terjadinya penyalahgunaan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			perusahaan	informasi dan persaingan industri yang tidak sehat.	Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
83	Data Perusahaan yang Mengajukan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan	UU No.14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat. Dapat menimbulkan kegaduhan antar industri dan menimbulkan adanya intervensi ke pihak tertentu	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
84	Hasil Verifikasi Restrukturisasi Mesin dan Peralatan	UU No.14 Tahun 2008	Penyalahgunaan Informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat. Dapat menimbulkan kegaduhan antar industri dan menimbulkan adanya intervensi ke pihak tertentu	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
85	Data Perusahaan yang Mengajukan Rencana Kebutuhan Industri (RKI)	UU No.14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat. Dapat menimbulkan kegaduhan antar industri dan menimbulkan adanya intervensi ke pihak tertentu	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
86	Hasil Verifikasi Rencana Kebutuhan Industri	UU No.14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi data perusahaan, dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat. Dapat menimbulkan kegaduhan antar industri dan menimbulkan adanya intervensi ke pihak tertentu.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
87	Penetapan Usulan Rencana Kebutuhan Industri	UU No.14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
88	Daftar nama perusahaan penerima bantuan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri TPT dan nilai bantuannya	UU No.14 Tahun 2008	Apabila dibuka, ada risiko dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
89	Data individu yang memuat seluruh data yang dilaporkan kepada Kementerian Perindustrian baik secara manual maupun secara elektronik dan aplikasi seperti: 1. Seluruh data individu perusahaan yang di input dan submit dalam aplikasi SIINas 2. Data individu pada aplikasi diluar SIINas	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 3. UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21	Penyalahgunaan informasi data perusahaan, dapat mengganggu perlindungan dari Persaingan usaha yang tidak sehat.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
90	Draft Dokumen MoU Kerja Sama Industri Luar Negeri	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Hingga diterbitkan MoU	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
91	Daftar nama perusahaan penerima bantuan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri makanan, hasil laut dan perikanan dan nilai bantuannya	UU No. 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat. Dapat menimbulkan kegaduhan antar industri dan menimbulkan adanya intervensi ke pihak tertentu.	Selama yang diperlukan atau ada peraturan perundang-undangan serta putusan dari lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
92	Laporan Hasil Verifikasi Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia (P2KDBK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
93	Verifikator/Pemroses Pelayanan Publik (Nama, kontak, dan data pribadi lainnya)	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat berpotensi pada intervensi oleh pengguna pelayanan publik dan mengungkap data pribadi pemroses	Menghindari potensi intervensi atau fraud serta menjaga data pribadi pemroses	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
94	Data Perusahaan yang disubmit untuk keperluan Pelaporan SIMBARA	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 3. UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
95	Data Perusahaan yang disubmit untuk keperluan proses Verifikasi Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 3. UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
96	Data pengawasan dan pengendalian industri (Persuratan, Dokumen proses pengawasan dan pengendalian, Hasil)	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
97	Data Perusahaan, Akademisi, dan Instansi yang disubmit User pada Website SI IMC (data pribadi dan data perusahaan/instansi)	1. UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Data pribadi apabila tidak dilindungi keamanannya dapat mengakibatkan pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
98	Data yang disubmit Perusahaan, Akademisi, dan Instansi pada proyek kolaborasi melalui Website SI IMC	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
99	Data Peserta Kegiatan yang disubmit untuk keperluan pendataan	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi apabila tidak dilindungi keamanannya dapat mengakibatkan pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
100	Data profil Sentra IKM Penerima Fasilitas Dana Alokasi Khusus	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan informasi data sentra yang menerima fasilitas	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
101	Nilai Hasil Monitoring dan Evaluasi Sentra Penerima Fasilitas Dana Alokasi Khusus	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Apabila data nilai disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena interpretasi terhadap nilai yang berpotensi multi-tafsir dikarenakan elaborasi yang tidak menyeluruh/tidak lengkap	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
102	Data Kegiatan yang dilaksanakan di Lingkungan Ditjen IKMA	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Apabila data disampaikan kepada masyarakat, dikhawatirkan berpotensi multi-tafsir dan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan secara sepihak	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan pengambilan kesimpulan sepihak	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
103	Data Perusahaan binaan Ditjen IKMA	1. UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 3. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Data pribadi apabila tidak dilindungi keamanannya dapat mengakibatkan pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan data pribadi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
104	Data Nilai hasil self-assessment adopsi INDI 4.0 untuk IKM	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Apabila data nilai disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena interpretasi terhadap nilai yang berpotensi multi-tafsir dikarenakan elaborasi yang tidak menyeluruh/tidak lengkap	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
105	Dokumen Design pada kegiatan Design Canvas dan Design Maker	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Apabila dibuka, ada risiko dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
106	Data Mentah Nilai ekspor industri pengolahan non migas berdasarkan HS	UU No. 14 Tahun 2008	- Terdapat aturan khusus dari unit penyedia data bahwa data tersebut tidak dapat dipublikasikan kepada umum. Penggunaan data hanya terbatas pada Direktorat AII saja - Belum ada metode untuk memvalidasi data tersebut	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
107	Data Perusahaan yang mengikuti kegiatan pendampingan pemanfaatan akses internasional bagi pelaku usaha industri dalam negeri	UU No. 14 Tahun 2008	Bila dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan perusahaan	untuk menghindari disalahgunakan oleh pihak tertentu	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
108	Penanganan Hambatan Akses (Dispute Settlement, Hambatan Teknis Perdagangan dan tuduhan Trade Remedies	UU No. 14 Tahun 2008	Bila dibuka dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak tertentu dan data berisi informasi sensitif negara	untuk menghindari disalahgunakan oleh pihak tertentu	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
109	Penanganan Trade Remedies (BMAD dan BMTP)	UU No. 14 Tahun 2008	Bila dibuka dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak tertentu dan data berisi informasi sensitif negara	untuk menghindari disalahgunakan oleh pihak tertentu	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
110	Dokumen Pengawasan (Hasil, Informasi Awal, BAP, Dokumen Pemanggilan)	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
111	Dokumen yang berkaitan dengan Proses Kegiatan seperti Dokumen Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Baperjakat	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
112	Laporan Pengaduan (Whistleblower, SP4N LAPOR)	1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
113	Data Perusahaan Industri (penerima penghargaan, fasilitasi, sertifikasi) dari Kementerian Perindustrian	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap hasil evaluasi kapabilitas dan kemampuan perusahaan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
114	Hasil assesment perusahaan peserta INDI 4.0 dan National Lighthouse	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap hasil evaluasi kapabilitas dan kemampuan perusahaan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
115	Dokumen rekaman cctv internal sekolah	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Mencegah Penyalahgunaan Informasi Rekaman CCTV dapat: diedit,disebarluaskan,d igunakan untuk intimidasi,dijadikan bahan perundungan (bullying), digunakan tanpa konteks yang benar.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
116	Dokumen investigasi pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf g	Berpotensi menimbulkan perundungan, diskriminasi, tekanan psikologis, pencemaran nama baik. Terutama jika melibatkan peserta didik.	Dokumen investigasi memuat informasi sensitif mengenai siswa maupun pegawai yang dapat memengaruhi reputasi dan kehidupan pribadi pihak terkait.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
117	Daftar nomor virtual account peserta didik	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penipuan, manipulasi pembayaran, phishing, akses tidak sah terhadap informasi transaksi.	Nomor virtual account berkaitan langsung dengan sistem pembayaran peserta didik sehingga bersifat rahasia.	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
118	Dokumen Ijazah dan Data Kelulusan Peserta Didik	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dokumen ijazah peserta didik dikecualikan dari informasi publik karena memuat data pribadi dan dokumen autentik pendidikan yang bersifat rahasia serta berpotensi disalahgunakan apabila diakses oleh pihak yang tidak berwenang	Mengandung data pribadi peserta didik seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk, nilai, dan nomor ijazah sehingga wajib dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan data dan pemalsuan dokumen	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
119	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai & hasil penilaian kinerja/kepuasan pegawai	1. Pasal 17 huruf a dan huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	1(satu) tahun diberikan berupa rekapitulasi pengaduan
120	Dokumen dan rekaman sistem mutu pada Produsen Bahan Acuan (PBA)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, e, dan h	Membuka rahasia resep produksi, persaingan dagang, dan rahasia personel	Penerapan persyaratan pada SNI ISO 17034:2016	Selamanya
121	Dokumen Rekaman Laporan Verifikasi TKDN	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17	Dapat membeirkan informasi sensitif perusahaan	Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Selamanya
122	Dokumen Rekaman Laporan Lembaga Penyelia Halal	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17	Dapat membeirkan informasi sensitif perusahaan	Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Selamanya
123	Proses hingga keputusan disiplin termasuk masalah pribadi pegawai	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Permanen
124	Hak akses data personal pegawai (Intranet kemenperin)	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Permanen

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
126	Rincian HPS yang terdiri dari: 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b 2. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44; dan 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 5. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing; 2. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; 3. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan 4. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat	1. Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan 2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan	Tahun berjalan (sampai kegiatan lelang)

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
127	Gambar Rancangan Pekerjaan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat b 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme; dan 2. Menimbulkan risiko keamanan	1. Keamanan dan kerahasiaan: Beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan; 2. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan 3. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas	Tahun berjalan (sampai kegiatan lelang)

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
128	Penawaran Teknis	1. UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf b 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 3. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 4. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru	1. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan 2. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.	Tahun berjalan (sampai kegiatan lelang)

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
129	Jawaban Sanggah	1. UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf b 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun setelah selesai pemeriksaan

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
130	Jawaban Sanggah Banding	1. UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf b 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun setelah selesai pemeriksaan
131	Draft Dokumen MoU kerjasama industri	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 butir i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan berubah	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Sampai laporan final diterbitkan
132	Hasil assessment lembaga penilaian kesesuaian	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, butir i	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Permanen

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
133	Dokumen milik Lembaga Sertifikasi	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Permanen
134	Data Peserta Indonesia Halal Industry Awards (IHYA)	1. UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Penyalahgunaan informasi data	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
135	Data Hasil Penilaian Indonesia Halal Industry Awards (IHYA)	1. UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Penyalahgunaan informasi data	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
136	Data perusahaan industri yang didaftarkan dan/atau memperoleh fasilitas sertifikasi halal	1. UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Penyalahgunaan informasi data	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
137	Data penerima fasilitas pelatihan SDM Industri	1. UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Penyalahgunaan informasi data	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
138	Informasi Sertifikat Tanah Satuan Kerja Kementerian Perindustrian	1. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 3. Permenperin No. 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Mengganggu keamanan aset Kementerian Perindustrian	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama Gedung Masih Berdiri/Belum Beralih tangan
139	Informasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (kendaraan dinas)	1. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 3. Permenperin No. 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Mengganggu keamanan dan risiko kehilangan kendaraan Dinas	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama Kendaraan masih ada dan belum Beralih tangan

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
140	Informasi mengenai Cetak Biru Gedung Kementerian Perindustrian	1. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 3. Permenperin No. 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Mengancam dan berpotensi mengganggu keamanan gedung	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama Gedung Masih Berdiri/Belum Beralih tangan
141	Informasi draf MoU Menteri Perindustrian dengan Negara Lain	1. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 3. Permenperin No. 50 Tahun 2015 Tentang SKKAD Kemenperin	Beresiko membatalkan MoU	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Selama masih menjadi Draft
142	Informasi Mengenai Dana Operasional Menteri Sebelum Pemeriksaan	Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga	Beresiko Terhadap Keamanan Menperin	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	5 tahun setelah selesai pemeriksaan

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Uraian)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
143	Informasi Mengenai Perusahaan Industri atau Kawasan Industri terkait Penetapannya Sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Berisiko dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
144	Daftar Nama dan Kompetensi Pegawai	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait kapabilitas atau kemampuan seseorang	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Permanen

a.n SEKRETARIS JENDERAL
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,



Arnes Lukman